

Potret Pemberdayaan Perajin Batik Semanggi di Kota Surabaya dalam Perspektif *Good Governance*

¹Susi Hardjati, ²Ananta Prathama, ³Kalvin Edo Wahyudi
¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail : ¹susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id, ²ananta_p@upnjatim.ac.id,
³kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

Abstrak

Kota Surabaya memiliki batik khas yang bernama batik semanggi. Batik ini diproduksi oleh kelompok perajin dari Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Selama ini, produksi batik semanggi dilakukan secara konvensional dengan tata kelola produksi yang sederhana. Akibatnya, daya saing batik semanggi menjadi rendah. Untuk itu, pemerintah dan beberapa elemen masyarakat di Kota Surabaya memberikan perhatian berupa program pemberdayaan untuk perajin batik semanggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat, khususnya perajin batik semanggi yang telah diimplementasikan dengan didasarkan atas nilai dan prinsip *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *good governance* yaitu aksi yang integratif antar tiga aktor, yaitu pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*) serta proporsionalitas peran dari aktor-aktor tersebut belum tercapai. Hal ini dikarenakan belum adanya komunikasi yang intensif antara tiga aktor tersebut. Akibat kondisi ini, beberapa prinsip *good governance* menjadi tidak tercapai seperti *consensus orientation*, *strategic vision*, *accountability* dan *effectiveness-efficiency*. Adapun prinsip-prinsip *participation*, *rule of law*, *transparency*, *responsiveness*, dan *equity* telah berjalan cukup baik. Untuk itu diperlukan adanya forum komunikasi antar aktor *governance* agar pemberdayaan menjadi lebih berkualitas.

Kata Kunci: batik semanggi, pemberdayaan masyarakat, *good governance*

Portrait of Semanggi Batik Crafters Empowerment in Surabaya City Based on Good Governance Perspective

Abstract

The city of Surabaya has a unique batik named “batik semanggi”. This batik was produced by a group of craftsmen from Sememi Village, Benowo District, Surabaya City. During this time, batik semanggi production is carried out conventionally with simple production management. As a result, the competitiveness of batik semanggi is low. To that end, the government and some elements of the community in the city of Surabaya pay attention in the form of empowerment programs for batik semanggi craftsmen. This study aims to analyze the community empowerment program of batik semanggi crafters that has been implemented based on the values and principles of good governance. The results showed that the value of good governance, which is an integrative action between three actors, namely government, civil society and the private sector, and the proportionality of the roles of these actors has not been achieved. This is due to the absence of intensive communication between the three actors. As a result of this condition, several principles of good governance have not been achieved such as consensus orientation, strategic vision, accountability and effectivity-efficiency. The principles of participation, rule of law, transparency, responsiveness, and equity have gone quite well. For this reason, a communication forum between governance actors is needed so that empowerment becomes more qualified.

Keywords: batik semanggi, community empowerment, *good governance*

A. PENDAHULUAN

Program pemberdayaan pada intinya adalah upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemberian ruang untuk prakarsa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Program-program pemberdayaan masyarakat di negara-negara berkembang yang selama ini dilakukan cenderung berpendekatan *top down*, yang mana peran pemerintah sangat dominan, sementara peran *civil society* dan elemen lain (*private sector*) cenderung lemah. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti tidak terakomodasinya nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga pada tahap implementasinya menjadi bermasalah. Untuk itu, diwacanakanlah gagasan baru yaitu *good governance* sebagai pendekatan baru dalam program pemberdayaan masyarakat.

Good governance dapat dianggap sebagai manifesto politik dan kebijakan publik baru¹ yang sangat dianjurkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan *good governance* menghendaki adanya peran integratif dan terbagi secara proporsional antara pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*)² dalam program-program, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Melalui penerapan *good governance* permasalahan-permasalahan tidak terakomodasinya nilai dan kepentingan masyarakat tersebut dapat diantisipasi. Hal ini dikarenakan *good governance* menghendaki adanya perluasan peran dari actor-aktor non-pemerintah, dalam hal ini adalah *civil society* dan *private sector* dalam tahapan-tahapan program pemberdayaan.

Seiring berjalannya desentralisasi dan otonomi daerah, penerapan program pemberdayaan masyarakat dengan karakter *good governance* menjadi semakin menguat. Hal ini dikarenakan teori *good governance* digunakan

sebagai dasar dalam kebijakan-kebijakan desentralisasi dan otonomi. Jadi, penerapan teori *good governance* dalam era desentralisasi dan otonomi daerah adalah suatu hal yang krusial. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerapkan teori *good governance* melalui pendekatan-pendekatan yang partisipatif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis usaha/industri kreatif. Salah satunya adalah usaha/industri batik khas Surabaya.

Di Kota Surabaya terdapat beberapa motif batik yang khas, salah satunya adalah batik Semanggi yang diproduksi oleh perajin dari Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo. Motif batik semanggi merupakan wujud apresiasi masyarakat atas tanaman semanggi yang menjadi ikon Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo. Tanaman semanggi ini banyak dimanfaatkan untuk kuliner khas Surabaya yaitu pecel semanggi. Selain itu, batik semanggi juga memiliki filosofi yaitu "semangat tinggi".

Pada awalnya, produksi batik semanggi di Kelurahan Sememi ini didirikan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK pada tahun 2015. Para pembatiknya merupakan ibu-ibu warga RT 1, RW 01 Jalan Sememi Jaya gang 8. Tujuan awal dari produksi batik ini adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sehingga masyarakat perajin berharap agar produksi batik semanggi bisa maksimal dan ekonomi keluarga makin meningkat. Namun, penelitian awal/penjajagan yang kami lakukan mengungkapkan adanya beberapa problem dalam produksi batik semanggi. Problem tersebut berkaitan dengan sistem produksi yang masih mengandalkan pesanan dan peralatan yang tradisional serta kemampuan pemasaran dari perajin yang masih minim. Selain itu, produksi batik semanggi pernah vakum/berhenti beroperasi selama 3 tahun.

Berdasarkan penelitian penjajagan di atas, nampaknya perlu dikaji bagaimana program pemberdayaan yang selama ini dilakukan, khususnya menggunakan pendekatan *good governance*. Jadi penelitian ini berfokus pada analisis penerapan nilai dan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemberdayaan perajin batik semanggi di

¹ Lihat Dwipayana et.al (2003)

² Lihat Keban (2008)

Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

Nilai yang sangat penting untuk diperhatikan dalam teori *good governance* adalah adanya aksi yang integratif antar tiga aktor, yaitu pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*)³. Aktor-aktor ini harus berjalan sinergis, integratif dan masing-masing harus berperan secara proporsional. Selain itu, pendekatan *good governance* memiliki beberapa prinsip yang perlu diwujudkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rondinelli⁴ menguraikan prinsip-prinsip *good governance* yaitu: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness-efficiency, accountability &, strategic vision*.

Nilai dan prinsip-prinsip di atas akan digunakan sebagai *framework* dalam menganalisis bagaimana penerapan *good governance* dalam pemberdayaan perajin batik semanggi. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk mencari keunggulan dan permasalahan dalam proses implementasi program pemberdayaan batik semanggi sehingga dapat memperkaya khasanah kelimuan khususnya dalam disiplin ilmu administrasi publik.

Penelitian sebelumnya dengan tema yang serupa telah ada namun di dengan lokasi yang berbeda, seperti penelitian Pamungkas (2010) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Industri Kecil Batik Semarang¹⁶ di Bukit Kencana Jaya Tembalang Semarang". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di objek penelitian tersebut telah berjalan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, bahkan pemberdayaan masyarakat melalui industri batik tersebut telah berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil masyarakat memang sangat dibutuhkan. Peran nyata pemerintah telah terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Namun, penelitian tersebut kurang mengeksplorasi peran dari *civil society* dan *private sector*.

Penelitian lainnya dengan tema serupa dapat dilihat dari penelitian Mayangsari (2015) yang berjudul "Dampak Pemberdayaan

Pengrajin Batik oleh Diskoperindag dan ESDM terhadap Peningkatan Kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo (dalam hal ini Diskoperindag dan ESDM telah berjalan optimal dan mampu meningkatkan kemampuan pengrajin batik, baik dalam penguasaan teknologi membatik maupun pencarian akses permodalan dan pemasaran. Dengan capaian tersebut, program pemberdayaan telah berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari dua penelitian terdahulu ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil masyarakat memang sangat dibutuhkan. Peran nyata pemerintah telah terbukti mampu meningkatkan keberdayaan pengrajin batik dan telah terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pengrajin batik menjadi lebih baik. Namun, penelitian tersebut kurang mengeksplorasi peran dari *civil society* dan *private sector*.

Penelitian terdahulu yang menggunakan perspektif *good governance* sebagai dasar analisis misalnya dapat dilihat dari hasil penelitian Wahyudi (2019) yang berjudul "Mewujudkan *Good Governance* dalam Implementasi Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai dan prinsip *good governance* dalam pemberdayaan BUMDesa belum optimal, baik di tingkat desa maupun supradesa. Di tingkat desa, belum tercapainya nilai dan prinsip *good governance* disebabkan atas situasi seperti adanya dominasi dari pihak eksekutif desa, rendahnya partisipatif dan adanya kecenderungan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda sikap politik. Adapun kegagalan penerapan nilai dan prinsip *good governance* pada level supra desa disebabkan oleh peran aktor-aktor *governance* yang cenderung parsial dan program pemberdayaan yang ada bukanlah hasil interaksi yang dialogis dari aktor-aktor *governance*.

Penelitian Wahyudi (2019) ini ditinjau dari fokusnya mirip dengan penelitian ini. Akan tetapi, konteks pemberdayaan yang dianalisis berbeda. Penelitian Wahyudi (2019) menganalisis konteks pemberdayaan pada lembaga/organisasi, sedangkan penelitian ini lebih pada masyarakat, yaitu masyarakat perajin batik semanggi. Dengan demikian,

³ Cheema dalam Keban (2008)

⁴ Lihat Keban (2008)

penelitian ini tetap memiliki keunikan yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan khususnya ilmu administrasi publik.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, *focus grup discussion* (FGD) dan pengumpulan dokumen. Adapun teknik analisis data menggunakan *interactive model* yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁵. Melalui metode tersebut diharapkan dapat terdeskripsikan bagaimana penerapan nilai dan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemberdayaan perajin batik semanggi di Kota Surabaya.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai nilai *good governance* yaitu aksi yang integratif antar tiga aktor, yaitu pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*) serta proporsionalitas peran dari aktor-aktor tersebut belum tercapai. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan penerapan nilai *good governance* belum terwujud. **Pertama**, belum ada aksi yang sinergis dan integratif antara tiga aktor *good governance* dalam program pemberdayaan perajin batik semanggi di Surabaya. Masing-masing aktor memiliki program dalam memberdayakan masyarakat perajin batik semanggi. **Kedua**, program pemberdayaan yang selama ini dijalankan, bukanlah program yang di"produksi" dari hasil komunikasi dan interaksi antar aktor *governance*, tetapi murni dari pemikiran masing-masing aktor dan diimplementasikan juga oleh masing-masing aktor. Artinya, memang belum ada aksi yang sinergis dan integratif antara tiga aktor *good governance* sebagaimana dimaksud.

Dalam hal ini, Pemerintah kota Surabaya memang telah memberikan beberapa program pemberdayaan kepada kelompok perajin batik semanggi seperti program pelatihan, permodalan, program bantuan pemasaran dan peralatan. Program-program pemberdayaan ini tentu sangat membantu para perajin batik semanggi. Namun, program ini murni inisiatif dari Pemerintah Kota Surabaya dan juga diimplementasikan oleh jajaran dinas terkait,

tanpa ada keterlibatan dari elemen aktor *governance* yang lainnya.

Di sisi lain, ada beberapa *civil society* (kelompok masyarakat madani) yang juga aktif memberikan pemberdayaan bagi perajin batik semanggi. Kelompok tersebut antara lain Fatayat Nahdlatul Ulama dan beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Fatayat Nahdlatul Ulama memberikan program pemberdayaan melalui pelatihan, bantuan pemasaran bahkan menjadikan motif batik semanggi sebagai seragam Fatayat Nahdlatul Ulama. Beberapa perguruan tinggi di kota Surabaya juga memberikan perhatian pada perajin batik semanggi melalui kegiatan pelatihan baik teknik membatik maupun pelatihan dalam pemasaran. Program ini juga merupakan program yang didasarkan atas inisiatif dan diimplementasikan oleh aktor tersebut tanpa ada keterlibatan dan aktor *governance* yang lain. Adapun peran dari pihak swasta (*private sector*) secara umum belum nampak dalam pemberdayaan batik semanggi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada dua hal yang menyebabkan nilai *good governance* belum tercapai sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu masalah belum adanya aksi yang terintegrasi dari pemerintah, *civil society* dan *private sector* dalam pemberdayaan batik semanggi di Kota Surabaya. Akibatnya, program pemberdayaan bukanlah hasil "produksi yang kolaboratif" dari aktor-aktor *governance*. Selanjutnya, terdapat alasan **ketiga**, yang mana mengindikasikan nilai *good governance* menjadi belum terwujud, yaitu dalam hal pembagian peran. Hasil penelitian menunjukkan, ternyata belum ada pembagian peran yang proporsional karena *private sector* belum memiliki kontribusi yang nyata dalam pemberdayaan perajin batik semanggi. Sebenarnya *private sector* dapat didorong untuk terlibat dalam pemberdayaan melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Potensi pelibatan *private sector* dalam pemberdayaan batik semanggi di Surabaya sebenarnya sangat tinggi mengingat ada banyak perusahaan besar yang ada di Surabaya.

Adapun penyebab utama dari dua masalah ini terdapat dalam aspek **komunikasi**. Belum ada forum komunikasi antara pemerintah, *civil society* dan *private sector* terkait bagaimana pembagian peran dalam pemberdayaan perajin batik semanggi di kota Surabaya. Tidak adanya forum komunikasi ini menyebabkan beberapa prinsip *good governance*

⁵ Miles dan Huberman dalam Satori dan Komariah (2018)

seperti *consensus orientation*, *strategic vision*, dan *accountability* menjadi tidak dapat diwujudkan. Selain itu, program pemberdayaan yang terkesan berjalan sendiri-sendiri tersebut menyebabkan prinsip *effectiveness-efficiency* menjadi kurang optimal. Adapun prinsip-prinsip *participation*, *rule of law*, *transparency*, *responsiveness*, dan *equity* telah berjalan cukup baik.

Jika dikaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya baik penelitian pamungkas (2010) Mayangsari (2015) maupun Wahyudi (2019), nampak bahwa peran aktor *governance* (baik *government*, *civil society*, maupun *private sector*) dalam pemberdayaan memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi, peran tersebut haruslah berjalan secara sinergis dan integratif yang mana masing masing aktor memiliki kontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Jika itu terjadi maka, pemberdayaan akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Adapun faktor penghambat belum terwujudnya nilai dan prinsip *good governance* dalam pemberdayaan perajin batik semanggi di Kota Surabaya mirip dengan apa yang menjadi hasil penelitian Wahyudi (2019) yaitu masalah belum adanya forum/wadah komunikasi antar aktor *governance*. Padahal forum/wadah komunikasi ini amat penting untuk dibangun agar program-program pemberdayaan dapat disusun secara lebih integratif dengan keterlibatan peran aktor *governance* yang lebih proporsional. Sehingga program pemberdayaan menjadi lebih efektif.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Nilai *good governance* yaitu aksi yang integratif antar tiga actor *governance*, yaitu pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta (*private sector*) serta proporsionalitas peran dari aktor-aktor tersebut belum tercapai. Hal ini dikarenakan belum adanya komunikasi yang intensif antara tiga aktor tersebut. Akibat kondisi ini, beberapa prinsip *good governance* menjadi tidak tercapai

seperti *consensus orientation*, *strategic vision*, *accountability* dan *effectiveness-efficiency*. Adapun prinsip-prinsip *participation*, *rule of law*, *transparency*, *responsiveness*, dan *equity* telah berjalan cukup baik. Untuk itu diperlukan adanya forum komunikasi antar aktor *governance* agar program pemberdayaan perajin batik semanggi di Kota Surabaya menjadi lebih sinergis dan berkualitas.

REFERENSI

- Dwipayana, AAGN., Rozaki, A., Sujito, A., Hidayana, B., Bramantyo., Purnomo, J., Hermawanti, M., Kurniawan, NI., Anggraini, NC., Zamroni, S., Eko, S. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Keban, Y. T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Mayangsari, A. 2015. Dampak Pemberdayaan Pengrajin Batik Oleh Diskoperindag dan ESDM terhadap Peningkatan Kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 3, No. 3. September-Desember 2015.
- Pamungkas, A. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Industri Kecil Batik Semarang16 di Bukit Kencana Jaya Tembalang Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Satori, D. & Komariah, A. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahyudi, K.E. 2019. Mewujudkan Good Governance dalam Implementasi Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur. Journals of Economics Development Issues (JEDI), Vol 2 (2019) 43-52.